

Daftar Pustaka

BUKU

AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Cet 2, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Achmad Chulaemi, Hukum Agraria Perkembangan Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya, Semarang, FH-UNDIP, 1986.

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan.6. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Boedi Harsono, UUPA, Sejarah Penyusunan, Isi, Pelaksanaan Hukum Agraria, Bagian I dan II Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1972.

B.F. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2005.

Edi Setiadi dan Dian Andrisari, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Effendi Peranginangin, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

Gunawan Widjaya dan Kartini Mulyadi, Jual Beli, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M Ali Syafaat, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Khaerandy, Ridwan, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa, UII, 1992.

Mulyoto, *Legal Standing*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.

Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Cetakan 3, Karya Media, Yogyakarta, 2014.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sri Sudaryatmi, Sukirno., TH. Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan I, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

_____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3696).

Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta.

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

UU No. 20 Th 2000 yang menggantikan UU No. 21 Th 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)